

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana
Provinsi Sumatera Utara



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Provinsi Sumatera Utara
Jl. S. Iskandar Muda No. 272 Medan

KATA PENGANTAR

Dengan memanajatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat serta hidayah-Nya jualah dapat menyelesaikan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat yang mengembang amanah dalam pelaksanaan program / kegiatan dalam mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah. Program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara berkaitan langsung dengan upaya Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Anak, dimana hal ini merupakan satu kesatuan dari Program Pembangunan Nasional yang dilaksanakan dalam lingkup kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerbitan LKIP ini diharapkan sebagai salah satu bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan dan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahap selanjutnya. Selain itu diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Medan, Februari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

DWI ENDAH PURWANTI, S.S, M.Si
NIP. 197301231998032002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.1.2 Anggaran.....	15
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	16
1.4 Dasar Hukum	17
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	18
BAB II	20
PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	20
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	26
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	26
BAB III.....	40
AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Kinerja	40
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	41
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	47
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	50

3.1.4	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	51
3.1.5	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	56
3.1.6	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	59
3.2	Realisasi Anggaran.....	81
BAB IV	95
PENUTUP	95
	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran tahun 2023 dan tahun 2024.....	16
Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	20
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama perangkat Daerah tahun 2024	22
Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas P3AKB Provsu	26
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024.....	27
Tabel 2. 5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	28
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2024	41
Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja	48
Tabel 3. 3 kemajuan Capaian Sasaran Strategis	50
Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	52
Tabel 3. 5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	57
Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	60
Tabel 3. 7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Provinsi Sumatera Utara.....	15
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara :

1.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera mempunyai tugas bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi Kewenangan Provinsi, dengan beberapa fungsi sbb :

- a. penyelenggaraan koordinasi perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pengawasan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan administrasi pendukung kebijakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara didukung oleh struktur organisasi yang telah diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara maka susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

- c. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;
- e. Bidang Pengendalian Penduduk;
- f. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- g. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas pengendalian, pengawasan, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. koordinasi pelaksanaan pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- c. koordinasi dan penyusunan target kinerja dan akuntabilitas kinerja;
- d. penatausahaan dan pelaporan keuangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa;
- f. pembinaan, penataan organisasi dan tata laksana;

- g. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- h. pengelolaan data dan informasi; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kelompok Jabatan Fungsional pada jabatan Analis Keuangan Pusat/ Daerah Ahli Muda
- c. Kelompok Jabatan Fungsional pada jabatan Perencana Ahli Muda

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan data, bahan dan referensi Urusan Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan program kerja kegiatan dan program kerja pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data umum dan kepegawaian;
- d. memfasilitasi penyusunan norma dan kriteria pelayanan kelembagaan, ketata laksanaan, administrasi umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan administrasi kearsipan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dan dokumen penting lainnya;

- f. melaksanakan pengendalian dan fasilitasi rapat-rapat, keprotokolan, hubungan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan rumah tangga, kebutuhan aset, perlengkapan dan peralatan, barang bergerak dan barang tidak bergerak pada Dinas;
- h. melaksanakan monitoring pengelolaan, penataan kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan aset, perlengkapan serta peralatan Dinas;
- i. melaksanakan persiapan dan tindaklanjut kelengkapan administrasi mutasi, kenaikan pangkat dan promosi pegawai, usulan kebutuhan pegawai, cuti pegawai, kenaikan gaji berkala dan pensiun, urusan karpeg, karis/karsu, taspen dan kesejahteraan pegawai lainnya;
- j. melaksanakan penyiapan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- k. melaksanakan persiapan usulan pegawai yang akan mengikuti diklat teknis dan fungsional;
- l. melaksanakan penilaian atas prestasi kerja bawahan dengan membuat catatan dalam buku penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan SKP (Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil) bawahan;
- m. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
- n. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pemberian masukan kepada Sekretaris, sesuai dengan tugasnya;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris;
- q. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di daerah.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- c. Kelompok Jabatan fungsional, pada jabatan Penyuluhan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak; dan
- d. Pengadministrasi Umum.

C. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak di daerah.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. penyelenggaraan koordinasi penanganan perlindungan hak perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda
- b. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Data dan Informasi

D. Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga;
- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pemenuhan Hak Anak dan peningkatan kualitas keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Analis Informasi; dan
- c. Pengadministrasi Umum

E. Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk.

Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. penyelenggaraan koordinasi upaya Pengendalian Penduduk;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pengendalian Penduduk;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pengendalian Penduduk;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Pengendalian Penduduk, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Penyusun Pencatatan dan Pelaporan Data Kependudukan dan KB;
- c. Penyusun Kependudukan dan KB;
- d. Penyusun Bahan Data Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- e. Pengelola Data Pengendalian Masyarakat.

F. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan, pelaksanaan, penguatan dan evaluasi kebijakan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. penyelenggaraan koordinasi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- c. penyelenggaraan koordinasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. penyelenggaraan koordinasi, pengendalian, pengawasan, pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. penyelenggaraan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :

- a. Kelompok jabatan fungsional, pada jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda;
- b. Analis Kesejahteraan Keluarga;
- c. Analis Pembinaan Keluarga Berencana;
- d. Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga.

G. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang

mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi;
- f. pendampingan korban;
- g. penyelenggaraan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja program dan kegiatan;
- h. penyelanggaran pelaporan akuntabilitas kinerja

PTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengaduan;
- c. Seksi Tindak Lanjut.

1) Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha memiliki uraian tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
- b. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. melaksanakan penyiapan administrasi sumber daya manusia, seperti pengolahan data kepegawaian;

- e. melaksanakan ketatausahaan, seperti melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan, pendistribusian surat-surat, naskah dinas, arsip serta barang bergerak dan barang tidak bergerak;
 - f. melaksanakan pencatatan data korban;
 - g. melaksanakan kerumahtanggaan, seperti penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, keamanan dan layanan kantor;
 - h. melaksanakan evaluasi hasil kerja Subbagian Tata Usaha;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;
 - k. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya;
- 2) Seksi Pengaduan mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
 - b. melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - c. melaksanakan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
 - d. melaksanakan pengelolaan kasus;
 - e. melaksanakan layanan perlindungan korban dan penampungan sementara di Rumah Perlindungan;
 - f. melaksanakan layanan mediasi sebelum proses hukum (non litigasi);
 - g. melaksanakan evaluasi hasil kerja Seksi Pengaduan;

- h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.
- 3) Seksi Tindak Lanjut mempunyai uraian tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
 - b. melaksanakan mediasi yang berkaitan dengan proses hukum (litigasi);
 - c. melaksanakan pendapingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
 - d. melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
 - e. melaksanakan evaluasi hasil kerja Seksi Tindak Lanjut;
 - f. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. melaksanakan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

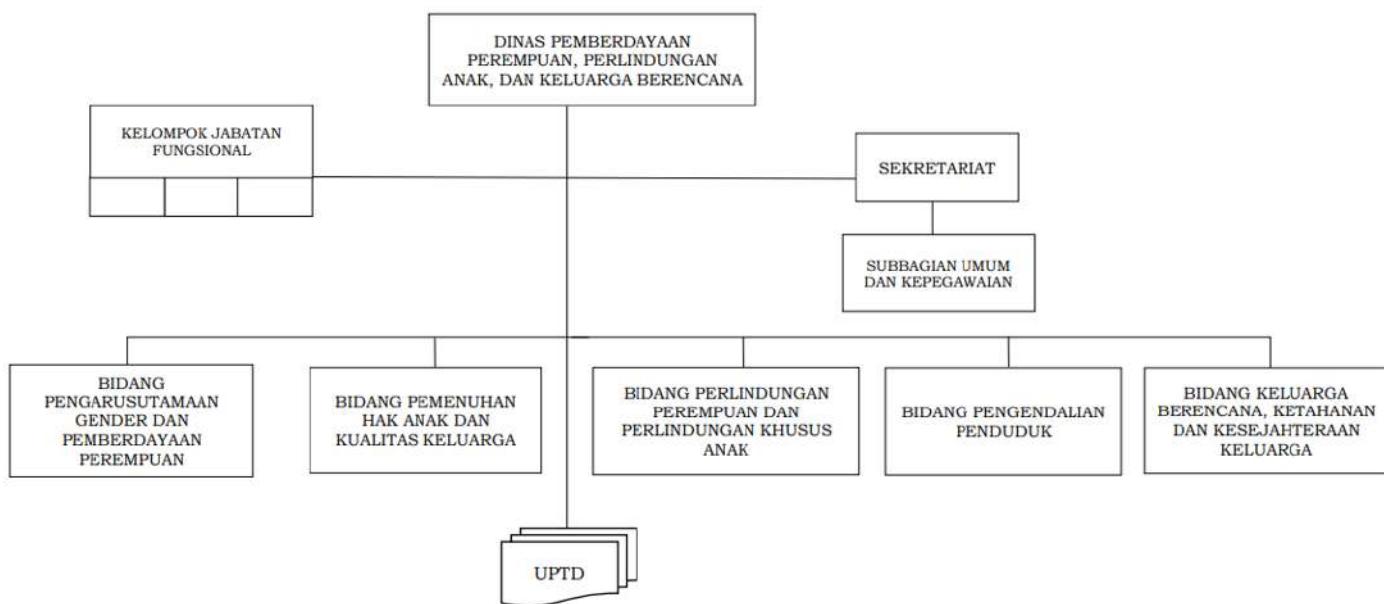
H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah

1.1.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1. 1 Perbandingan Anggaran tahun 2023 dan tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
Urusan PPPA		
APBD	Tahun 2023	Rp 21.194.094.196
APBD	Tahun 2024	Rp 17.592.571.468
Urusan PPKB		
APBD	Tahun 2023	Rp 758.763.760
APBD	Tahun 2024	Rp 174.770.700

Sumber : LRA BKAD Provsu

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan pelindungan anak dan keluarga berencana, yang masuk dalam agenda pembangunan pada tahun 2024 yaitu :

- a. Lemahnya integrasi Pengarusutamaan Gender ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- b. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Belum Optimalnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak termsuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
- d. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas hidup anak melalui Provinsi Layak Anak
- e. Belum optimalnya pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah;
- f. Belum seimbangnya pertumbuhan penduduk, dan
- g. Belum optimalnya upaya ber KB dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Isu Strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang,

sebagaimana pemetaan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah :

1. Kesetaraan dan Keadilan Gender;
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. Pemenuhan hak anak melalui Provinsi Layak Anak;
4. Pertumbuhan penduduk yang belum seimbang dan berkualitas.

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa

mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah : Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun sasaran pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 - 2026 adalah:

1. Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
2. Meningkatkan Perlindungan Anak;
3. Meningkatkan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2024
1.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak serta pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi	%	28%
			Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	16
2.		Meningkatkan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak	per 100.000 penduduk usia anak	28

		Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi	%	86%
3.	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)		2,42

Sumber : Renstra Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama perangkat Daerah tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategi s	Indikato r Kinerja	Satua n	Penjelasan			Sumber Data
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan		
1.	Meningkatkan Implementasi Pengaruh sutamaan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pengaruh sutamaan Gender dalam Pembangunan	Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi	%	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan suatu proses yang perlu dilaksanakan oleh para perencana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai wujud adanya komitmen para pengambil keputusan, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.	Jumlah perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang responsive gender _____ x 100 % Jumlah keseluruhan perangkat daerah		Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AKB Provsu

2.	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.00	Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasukancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Sesuai Pasal 1, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak)	Jumlah korban <hr/> Jumlah penduduk <hr/> Jumlah korban usia anak neremnian 18 Thn ke <hr/> Jumlah Anak usia sampai dengan 18 Thn	x x 100.000	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AKB Provsu
			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	per 100.00				

3.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya kualitas hidup anak dan perlindungan khusus anak	Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi	%	Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak	<p>Jumlah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah yang mendukung KLA</p> <hr/> <p style="text-align: right;">x 100 %</p> <p>Jumlah keseluruhan perangkat daerah di Sumut</p>	Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AKB Provsu
----	---------------------------------	---	--	---	---	---	--

4.	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	point	Totak Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur/reproduksinya	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDKI: 5 tahunan 2. Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan 3. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan 	Bidang Pengendalian Penduduk dan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Dinas P3AKB Provsu
----	--	---	----------------------------	-------	---	--	--

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 :

Tabel 2. 3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas P3AKB Provsu

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
1.	Meningkatkan Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Persentase Implementasi PPRG di tingkat Provinsi	%	36%
2.	Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan	per 100.000 penduduk perempuan	9
			Rasio kekerasan terhadap anak	per 100.000 penduduk usia anak	16
3.	Meningkatkan pemenuhan hak anak	Meningkatnya kualitas hidup anak dan perlindungan khusus anak	Persentase Implementasi Pemenuhan Hak Anak di tingkat Provinsi	%	86%
4.	Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	point	2,42

Sumber : Rencana Kerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya implementasi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	28%
2	Meningkatnya perlindungan terhadap hak perempuan dan perlindungan khusus anak serta optimalisasi kualitas layanan	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 penduduk perempuan	16/100.000
		Rasio kekerasan terhadap anak per 100.000 jumlah penduduk usia anak	28/100.000
3	Meningkatnya Kontribusi Perangkat Daerah Dalam Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak (menuju)	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (menuju)	86%
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rete (Angka Kelahiran Total)	2,42

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 :

**Tabel 2. 5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Persentase Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	100 %
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	11 Dok
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	13 kali
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 doku men
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 kegia tan
	5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	68 stel
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2 kali

			Bangunan Kantor yang Disediakan	
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 buah
	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 kali
	9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 kali
	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	960 Dok
	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 laporan
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan
	13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan
	14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 kali

	16	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit
	17	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		Persentase Anggaran yang Responsif Gender (ARG) pada Belanja Operasi APBD Provinsi	100 %
II.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			
	18	Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 kebijakan
	19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	42 perangkat daerah
II.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi			
	20	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang	25 lembaga

			politik, hukum, sosial dan ekonomi	
II.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
	21	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat provinsi	20 orang
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Terimplementasi	100 %
III.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	22	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	350 Orang
	23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Jumlah Korban Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban	70 layanan

		Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Kekerasan Kewenangan Provinsi	
III.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			
	24	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	250 Orang
	25	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	- Dok
	26	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	20 orang
III.3	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
	27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 Dok

		Perempuan Kewenangan Provinsi		
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase layanan kualitas keluarga yang tersedia	100	%
IV.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
	28	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1 doku men
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase data gender tersedia	100	%
V.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			
	29	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	- Dok
	30	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	- Dok
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase variabel kluster hak anak terimplementasi	100	%
VI.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			

	31	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	24	Pera ngka t daer ah
VI.2		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
	32	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	430	Oran g
	33	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1	kegia tan
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase Kebijakan Perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus terimplementasi	100 %	
VII.1		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota			
	34	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/ Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	-	Oran g

	35	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dok
VII.2		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		
	36	Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	200
VII.3		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota		
	37	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	- Dok
	38	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	kegiatan
	39	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	20 orang
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			100 %

VIII.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		
	40	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK
	41	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
	42	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program bangga Kencana dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain
VIII.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		
	43	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		100 %
IX.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
	44	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja
	45	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
	46	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
	47	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai

IX.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		100 %
	48 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	2 Organisas i
X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		100 %
X.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
	49 Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kelompok Genre yang dibina	4 kelompok
	50 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	2 Laporan
	51 Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	3 Dok

	52	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	5 Unit
X.2		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
	53	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3 dokumen
	54	Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga / Fasilitasi Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga di Tingkat provinsi dan kab kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	2 Laporan

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas P3AKB Provsu

Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara selaku pengembang amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi

pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Targe t	Realisa si	Capaia n	Sumber Data
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	24%	54,7%	237,5 %	Bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AKB Provsu
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	11,4	11,21	98%	Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Dinas P3AKB Provsu
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,8	2,66	95%	
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota	86%	80%	93%	Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas

		(menuju) Layak Anak				P3AKB Provsu
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2,42	2,36	102,5 %	Bidang Pengendali an Penduduk dan Bidang Keluarga Berencana , Ketahanan dan Kesejahter aan Dinas P3AKB Provsu

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

Sasaran Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG. Pada tahun 2024 indikator Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG diberikan target sebesar 10 Perangkat Daerah atau sebesar 24% dari total jumlah Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara potensial sebanyak 23 unit perangkat daerah yang sudah melaksanakan PPRG dengan variabel pendukung berupa adanya dokumen pendukung seperti Renja, RKA dan DPA Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah responsive Gender. Target ini tidak mengalami perubahan meskipun adanya *refocusing* anggaran, karena adanya komitmen yang kuat dari setiap Perangkat Daerah untuk mendukung penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Adapun ke 23 Perangkat Daerah yang telah memiliki dokumen responsif gender tersebut adalah :

1. Biro Hukum Setdaprovsu
2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprovsu
3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu
4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu
5. Biro Perekonomian Setdaprovsu
6. Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu
7. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu
8. Biro Organisasi Setdaprovsu
9. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sumatera Utara
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara
12. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara
13. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara
14. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
15. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Sumatera Utara
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara
18. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara
19. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara
20. RSU Haji Medan Provinsi Sumatera Utara
21. Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara
22. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
23. RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara

Capaian sebanyak 23 Perangkat Daerah dari target sebanyak 10 OPD yang mendukung perencanaan dan penganggaran responsif gender,

mengindikasikan bahwa perencanaan pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender di Sumatera Utara sudah cukup baik.

Sasaran Meningkatnya Layanan dan Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Mengalami Kekerasan.

Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu meningkatnya layanan dan upaya perlindungan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang adalah Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak.

Pada tahun 2024, target pencapaian indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan dewasa sebanyak 11,4. Berdasarkan data laporan kekerasan yang tersaji pada aplikasi kekerasan, pada tahun 2024 terdapat 623 perempuan yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk perempuan di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 5.556.410. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap perempuan dari setiap 100.000 penduduk perempuan adalah sebanyak 11,21 perempuan mengalami kekerasan di Provinsi Sumatera Utara (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>).

Sedangkan untuk rasio kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara, pada tahun 2024 memiliki target sebesar 2,8 dari setiap 10.000 penduduk usia anak. Berdasarkan data yang tersaji pada aplikasi laporan kekerasan, pada tahun 2024 terdapat 1.199 anak yang menjadi korban kekerasan dari total jumlah penduduk usia anak di Provinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 4.499.909. Sehingga realisasi rasio kekerasan terhadap anak dari setiap 10.000 penduduk usia anak, sebanyak 2,66 orang anak mengalami kekerasan (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id>).

Capaian dari rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024, memperlihatkan perlunya intervensi yang lebih kuat kepada upaya pencegahan dan penurunan kekerasan terhadap anak di Sumatera Utara dengan optimalisasi koordinasi dan regulasi yang akan mendukung percepatan penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara.

Sasaran Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak

Capaian kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Implementasi Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak dengan indikator capaian sasaran strategis yaitu Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak yang mana pada tahun 2024 memiliki target sebanyak 26 perangkat daerah berkontribusi atau sebesar 86% dari Perangkat Daerah yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA (30 OPD), dengan realisasi target kinerja sebanyak 24 perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Sumatera Utara atau sebesar 80% dari total keseluruhan perangkat daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
2. Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Dinas Perpustakaan dan Arsip
4. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Dinas Sosial
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
8. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Perikanan dan Kelautan

11. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
12. UPTD Khusus RSU Haji Medan
13. Dinas Perhubungan
14. UPTD Khusus Rumah sakit jiwa Prof.Dr.M. Ildrem
15. Dinas Pendidikan
16. Satuan Polisi Pamong Praja
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu
18. Biro Umum Setdaprovsu
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
20. Badan Pendapatan Daerah
21. Dinas Perkebunan dan Peternakan
22. TP PKK

Pencapaian hasil dari yang ditargetkan ini, memberikan gambaran bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara sebagai pengampu kegiatan implementasi KLA di Sumatera Utara tetap berkomitmen untuk mewujudkan Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi Layak Anak.

Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Angka Kelahiran Total menggambarkan ukuran keberhasilan pengendalian pertumbuhan penduduk. Indikator TFR dibutuhkan untuk dapat membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan

kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Selain itu, TFR juga dapat digunakan sebagai salah satu parameter proyeksi jumlah penduduk.

Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) termasuk faktor sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan tingkat urbanisasi. Faktor Ekonomi misalnya tingkat pendapatan dapat mempengaruhi fertilitas. Ketika pendapatan seseorang meningkat akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi fertilitas adalah tingkat kesehatan yang dapat diwakili dengan akses pelayanan kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita usia 15-49 yang berstatus kawin. Keduanya berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas.

Berdasarkan PK23 ADJ SUSENAS 2024, TFR Sumatera Utara sebesar 2,36 mengalami penurunan 0,03 poin dari tahun 2023 yaitu 2,39 (Long Form SP 2020). Namun, angka ini masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka Nasional sebesar 2,18 (PK23 ADJ SUSENAS 2023).

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2021 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	2022	2023	2024		
			Realisa si	Realisa si	Targe t	Realisa si	Capaia n
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	94%	100%	24%	54,7%	237,5 %
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	11	7	11,4	11,21	98%
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	19	19	2,8	2,66	95%
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak	70%	100%	86%	80%	93%
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2,48	2,39	2,42	2,36	102,5 %

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2022-2024

Capaian sasaran strategis Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah dengan indikator Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG pada tahun 2022 adalah sebesar 94 persen atau sebanyak 44 OPD yang telah memiliki dokumen pendukung yang responsif gender, mengalami peningkatan sebesar 6 persen pada tahun 2023 menjadi 100 persen (44 OPD), dan tahun 2024 sebesar 54,7 persen atau sebanyak 23 Perangkat Daerah telah berperan aktif dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran responsif gender yang tertuang di dalam agenda pembangunan daerah. Pada tahun 2022 dan 2023 kriteria perangkat daerah yang melaksanakan PPRG hanya sampai tahap perencanaan, sedangkan pada tahun 2024 kriteria diperluas tidak hanya pada tahap perencanaan tetapi sampai pelaksanaan kegiatan yang responsif gender melalui Laporan Pelaksanaan PUG, sehingga pada tahun ini target diturunkan menjadi 24% dengan realisasi mencapai 54,7%.

Untuk capaian strategis Meningkatnya Layanan dan Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mengalami Kekerasan, dengan indikator kinerja yang terbagi kepada 2 indikator yaitu Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan per 100.000 penduduk perempuan dan Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 penduduk usia anak. Pada tahun 2022 dari 100.000 penduduk perempuan sebanyak 11 penduduk perempuan mengalami kekerasan, capaian ini mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 7 orang penduduk perempuan dan pada tahun 2024 sebanyak 11,4 orang penduduk perempuan mengalami kekerasan.

Pada sasaran strategis nomor 4 (empat) yakni “Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)” menunjukkan terjadinya tren penurunan angka realisasi TFR dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, nilai TFR terealisasi sebesar 2,36 (di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 2,42), yang artinya rata-rata

setiap keluarga yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki 2-3 orang anak.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara periode 2019-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 3 kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
-1	-2	-3	-4	-5	(6) =4/5*100
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	54,7%	28%	195%
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	11,21	16	70%
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,66 / 10.000	28 / 100.000	95%
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak	80%	86%	93%

4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2,36	2,42	102,5%
---	--	--	------	------	--------

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

Bila melihat pada target capaian di akhir rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada tahun 2024, maka terdapat 1 indikator yang melebihi target (195 persen) untuk akhir rencana strategis (tahun 2024) yaitu indikator Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG atau sebanyak 23 perangkat daerah telah menyusun PPRG. Pada tahun sebelumnya kriteria perangkat daerah yang melaksanakan PPRG hanya sampai tahap perencanaan, sedangkan pada tahun 2024 kriteria diperluas tidak hanya pada tahap perencanaan tetapi sampai pelaksanaan kegiatan yang responsif gender melalui Laporan Pelaksanaan PUG, sehingga pada tahun ini target diturunkan menjadi 24% dengan realisasi mencapai 54,7%.

Untuk beberapa indikator strategis lainnya seperti Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak (93 persen) atau sebanyak 23 perangkat daerah potensial telah melaksanakan program/kegiatan yang mendukung upaya perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan sebesar 70 persen, Rasio Kekerasan Terhadap Anak dengan capaian sebesar 95 persen, indikator TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total) dengan capaian 97 persen.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator	Targe t	Realisa si	Capaia n	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	24%	54,7%	237,5%	Adanya komitmen yang tinggi dari setiap pemangku kepentingan dalam merealisasi indikator melalui optimalisasi tugas dan fungsi dari SDM yang terlibat aktif dalam integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan responsif gender dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan setara bagi setiap lapisan masyarakat di Sumatera Utara
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	11,4	11,21	101,6%	Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan	Penguatan kebijakan pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban

	terhadap perempuan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,8	2,66	105,2%	dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui aplikasi pelaporan yang telah disediakan	kekerasan termasuk TPPO Peningkatan kapasitas SDM yang terlibat dalam pemberian layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak	86%	80%	93%	1. Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah KLA yang akan menjadi peta jalan perwujudan Provinsi Layak Anak di Sumatera Utara. 2. Kurang maksimalnya tugas, fungsi dan peran Gugus Tugas Kab./Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Utara	1. Menyusun RAD KLA Provinsi Sumatera Utara sebagai pedoman/peta jalan perwujudan Kab./Kota Layak Anak di Sumatera Utara menuju Provinsi Sumatera Utara Layak Anak (PROVILA) 2. Melakukan revitalisasi dan penguatan terhadap anggota Gugus Tugas Kab./Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Utara
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2,42	2,36	102,54 %	Meningkatnya capaian Persentase WUS yg menggunakan alat kontrasepsi modern	

				dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Hal ini disebabkan karena ketersediaan alkon yang sudah terdistribusi ke seluruh faskes yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara, serta adanya sinkronisasi Program dan Kegiatan Prioritas antara Pusat, Provinsi dan Daerah	
--	--	--	--	---	--

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

Bila melihat tabel di atas, dapat dikatakan bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan capaian kinerja dari urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Provinsi Sumatera Utara.

Capaian dari indikator Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG, mencapai lebih dari 100 % dari target. Hal ini salah satunya dikarenakan target yang diturunkan menjadi 24% karena kriteria perangkat daerah yang melaksanakan PPRG pada tahun ini tidak hanya pada tahap perencanaan tetapi sampai pelaksanaan kegiatan yang responsif gender melalui Laporan Pelaksanaan PUG, sehingga pada tahun ini target diturunkan menjadi 24% dengan realisasi mencapai 54,7%. Secara umum capaian ini juga didukung oleh tingginya komitmen dari para pengambil kebijakan di lingkungan perangkat daerah Provinsi Sumatera Utara, hal ini merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Namun demikian upaya peningkatan terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas SDM pelaksana kegiatan responsif gender dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dan setara bagi setiap lapisan masyarakat di Sumatera Utara.

Beberapa indikator yang tidak tercapai hingga akhir kinerja Renstra (Tahun 2024) seperti Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak membutuhkan Penguatan kebijakan perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak di tingkat pemerintah Kabupaten/Kota yang melibatkan seluruh stakeholder potensial.

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak, dan indikator Angka Kelahiran Total, memiliki kendala pada minimnya anggaran intervensi dan beberapa kendala teknis lainnya seperti belum

optimalnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui aplikasi pelaporan yang telah disediakan dan belum meluasnya jejaring mitra intervensi program dan kegiatan di 33 kabupaten/kota. Dengan kondisi ini maka Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara akan berupaya untuk meningkatkan kinerja dengan beberapa strategi seperti upaya peningkatan koordinasi dalam penyesuaian anggaran intervensi yang meliputi 33 kab/kota dan peningkatan kapasitas SDM teknis serta perluasan jejaring kerjasama mitra yang melibatkan lembaga/organisasi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik budaya dan segmentasi sasaran.

3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 5 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	24%	54,7%	237,5%	174.494.000	147.069.000	84,28%	354.899.000
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan	11,4	11,21	98%	517.681.520	453.574.741	87,62%	139.421.800
		Rasio Kekerasan Terhadap Anak	2,8	2,66	95%	202.903.750	148.805.150	73,34%	44.626.300
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak	86%	80%	93%	152.557.000	150.199.438	98,45%	371.711.000

LAPORAN KINERJA DINAS P3AKB PROVSU TAHUN 2024

4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	2,42	2,36	102,5%	115.755.70 0	115.305.70 0	99,61%	250.011.00 0
---	--	---	------	------	--------	-----------------	-----------------	--------	-----------------

Sumber : Laporan Realisasi Kinerja Dinas P3AKB Provsu Tahun 2024

3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3. 6 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian	Menunjung / Tidak Menunjung	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran bagi Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100%		
				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		19%		
				Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	1 kebijakan	menunjung	Penyusunan dokumen Rencana Aksi Implementasi PUG di Provinsi Sumatera Utara masih dalam tahapan draft sehingga akan dikuatkan dengan upaya optimalisasi koordinasi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait dalam

					penyusunan Rencana Aksi PUG Sumatera Utara
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	42 perangkat daerah	menunjang Masih muncul kendala terkait dengan teknis penyusunan dokumen PPRG sehingga memerlukan penguatan fungsi Kelompok Kerja PUG yang di tingkat Provinsi
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		36%	

		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	25 lembaga	menunjang	Belum optimalnya pelaksanaan penguatan perempuan dalam bidang politik melalui pelaksanaan kegiatan penguatan politik bagi perempuan untuk menyambut tahun politik tahun 2024
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		49%		
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari /Sehat/Pintar/Kepemimpinan/H	20 orang	menunjang	Belum optimalnya penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan berbasis data sehingga disusun database bagi lembaga-lembaga yang menyediakan layanan Pemberdayaan Perempuan di Sumut

					ukum pd LPLPP tingkat provinsi			
2	Meningkatnya layanan dan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kebijakan Perlindungan Perempuan Terimplementasi	100%		
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		77%		
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	350 orang	menunjang	Belum terbangunnya layanan berbasis aplikasi online sehingga akan disusun rencana pembuatan layanan pengaduan berbasis aplikasi online

Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan Masyarakat			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	70 layanan	menunjang	Belum ada intervensi pencegahan berbasis data pemetaan melalui upaya pemetaan intervensi kekerasan berbasis data
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		40%		
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan	250 orang	menunjang	Belum optimalnya distribusi kebutuhan spesifik kepada perempuan dalam kondisi darurat dan kondisi khusus akan dioptimalkan melalui alokasi anggaran yang memadai

Kewenangan Provinsi	Pemenuhan Kebutuhan Spesifik			
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	- dok	menunjang	Jejaring lembaga penyedia layanan perlindungan Perempuan masih belum tersebar ke 33 kab/kota dan akan dioptimalkan melalui koordinasi antar provinsi dan kab/kota
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	20 orang	menunjang	Kegiatan belum menyentuh keseluruhan kab/kota sehingga akan disusun peta potensi

		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		81%		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	1 dok	menunjang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan masih belum menyentuh pada basis kekerasan terhadap perempuan, sehingga memerlukan pemetaan basis kekerasan yang disusun secara sistematis
	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		91%		
		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak		93%		

		Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota				
		Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	- Orang menunjang		Belum tersedianya data yang akurat terkait dengan anak dalam kondisi khusus sehingga akan disusun databased AMPK Sumut, melalui optimalisasi koordinasi lintas sektor
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 dok menunjang		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap anak masih belum menyentuh pada basis kekerasan terhadap perempuan, sehingga memerlukan pemetaan basis kekerasan yang disusun secara sistematis

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota		89%		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-dok menunjang		Belum optimalnya kampanye AMPK ke Kab/Kota Akan disusun rencana kegiatan yang lebih efisien
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	- kegiatan menunjang		Terjadinya rotasi perubahan SDM pengampu kegiatan di Lembaga Penyedia Layanan sehingga akan disusun buku pintar bagi Lembaga Penyedia Layanan AMPK

		Kewenangan Provinsi			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	4 dok	menunjang
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		91%	

				Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	200 orang	menunjang	Masih terbatasnya layanan yang diberikan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, sehingga akan dioptimalkan dengan penguatan koordinasi dalam pemberian layanan bagi AMPK yang memerlukan peran berbagai pihak
3	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak	Persentase Perangkat Daerah Berkontribusi Mewujudkan Kab/Kota (menuju) Layak Anak	100%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		100%		

		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	24 perangka t daerah	menunja ng	1. Belum tersusunnya Rencana Aksi Daerah KLA yang akan menjadi peta jalan perwujudan Provinsi Layak Anak di Sumatera Utara. 2. Belum optimalnya tugas, fungsi dan peran Gugus Tugas Kab./Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Utara.
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		84%		
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	350 Orang	menunja ng	Belum tersedianya layanan terpadu untuk peningkatan kualitas hidup anak yang akan diintervensi dengan pelaksanaan kegiatan terintegrasi dan terpadu untuk penyediaan dan peningkatan kualitas hidup anak

				Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 kegiatan	menunjang	Belum tersusunnya data base penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak menyebabkan upaya peningkatan kualitas hidup anak belum dapat dilaksanakan secara komprehensif, sehingga diperlukan database terkait dengan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di 33 kabupaten/kota
4	Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR)	TFR/Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	84%	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		100%		
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		60%		

6			Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/ SSK dan Pojok Kependudukan/P JK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/ SSK dan Pojok Kependudukan/ PJK	3 laporan	menunjang	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) berjalan dengan baik
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kepenedudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	1 dok	menunjang	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi dapat dilaksanakan dengan optimal
			Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi	3 daerah	menunjang	Anggaran untuk melakukan pembinaan, peningkatan dan pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB sangat terbatas sehingga memerlukan peningkatan alokasi anggaran yang

		KKBPK dan Sektor Lain	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor LainKeluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain		dilaksanakan melalui pengusulan peningkatan anggaran
		Pemetaan Perkiraa Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		40%	
		Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dok	menunjang
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA			Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat dilaksanakan secara optimal

BERENCANA (KB)				
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				
Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	4 dokumen		1. Strategi kemitraan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam Program KB belum optimal sehingga perlu upaya pada peningkatan kolaborasi program kerja dengan mitra dan sektor terkait 2. Penyelenggaraan Advokasi dan KIE perlu di tingkatkan melalui peningkatan kegiatan advokasi dan KIE 3. Anggaran untuk melakukan pembinaan,
Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program	2 dokumen	menunjang	

	Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			peningkatan dan pengembangan strategi penyelenggaraan Program KB sangat terbatas melalui optimalisasi monitoring dan evaluasi akses dan kualitas pelayanan KB yang merata bagi masyarakat serta menyusun usulan kegiatan yang menjangkau sasaran khusus seperti: keluarga berisiko stunting dan PUS muda.
	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	3 dok	
	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan	3 laporan	

		Kearifan Budaya Lokal	Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
		Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	2 Organisasi	menunjang

		(Bangga Kencana)			
PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kelompok Genre yang dibina	- kelompo k	menunja ng	Belum semua Kab/Kota dapat di jangkau sebagai target sehingga perlu dilakukan penambahan Target Kab/Kota	
Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	- laporan			

		Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	- dokumen		
		Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	- unit		
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				

		Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	3 dokumen		
		Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	2 laporan		

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		16.459.982.692	15.741.786.524	96%
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		85.466.150	85.465.500	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun	85.466.150	85.465.500	100%
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.001.290.841	12.410.797.304	95%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12.798.280.841	12.209.957.304	95%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa yang disediakan	203.010.000	200.840.000	99%
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		144.400.000	142.570.000	99%
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	86.250.000	86.250.000	100%
5	Pengadaaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	58.150.000	56.320.000	97%
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		948.879.143	927.061.602	98%

LAPORAN KINERJA DINAS P3AKB PROVSU TAHUN 2024

6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13.757.522	13.756.450	99%
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	105.591.503	97.900.000	93%
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	173.730.168	171.466.200	98%
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	39.348.900	30.290.000	77%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	4.747.000	4.745.000	99%
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	611.704.050	608.903.952	100%
I.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.882.601.192	1.808.477.705	96%
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	454.400.000	439.047.926	97%
13	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	1.425.671.692	1.366.916.779	96%
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.529.500	2.513.000	99%
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		397.345.366	367.414.413	92%
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dilakukan	248.461.366	219.996.413	88%

16	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung yang dilakukan	126.944.000	126.278.000	99%
17	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana pendukung yang dilakukan	21.940.000	21.140.000	96%
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		174.494.000	147.069.000	84%
II.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi		116.613.000	94.138.000	81%
18	Penyusunan kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	84.635.000	63.818.000,00	75%
19	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	31.978.000	30.320.000	95%
II.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi		44.381.000	39.431.000	89%
20	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mengikuti Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,	44.381.000	39.431.000	89%

		Hukum, Sosial dan Ekonomi			
II.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi		13.500.000	13.500.000	100%
21	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari / Sehat/ Pintar/ Kepemimpinan/ Hukum pd LPLPP tingkat provinsi	13.500.000	13.500.000	100%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		517.681.520	453.574.741	87%
III.1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		325.814.520	271.668.491	77%
22	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	208.074.520	199.779.491	96%

23	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	117.740.000	71.889.000	61%
III.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi		141.019.500	131.813.250	88%
24	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	106.510.750	103.751.250	97%
25	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten /	0	0	93%
26	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	34.508.750	28.062.000	81%

III.3	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		50.847.500	50.093.000	98%
27	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	50.847.500	50.093.000	98%
IV	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA		84.952.506	57.682.550	68%
IV.1	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi		84.952.506	57.682.550	68%
28	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	84.952.506	57.682.550	68%
V	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		0	0	0%

V.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi		0	0	0%
29	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	0	0	0%
VI	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		152.557.000	150.199.438	98%
VI.1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi		1.792.000	1.792.000	100%
30	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	1.792.000	1.792.000	100%
VI.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi		150.765.000	148.407.438	98%
31	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	140.629.000	139.490.000	99%

32	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	10.136.000	8.917.438	87%
VII	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		202.903.750	148.805.150	91%
VII.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten Kota		50.655.000	50.655.000	100%
33	Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/ Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi	50.655.000	50.655.000	100%
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	0	0	0%
VII.2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi		117.740.000	70.081.150	60%

LAPORAN KINERJA DINAS P3AKB PROVSU TAHUN 2024

35	Koordinasi Pelaksanaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	117.740.000	70.081.150	60%
VII.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab Kota		34.508.750	28.069.000	81%
36	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	0	0	0%
37	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi	0	0	0
38	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK Kewenangan Provinsi	34.508.750	28.069.000	81%
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		115.755.700	115.305.700	98%

VIII.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		86.861.000	86.411.000	99%
39	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/ SSK dan Pojok Kependudukan/ PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/ SSK dan Pojok Kependudukan/ PJK	20.760.000	20.310.000	98%
40	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	11.000.000	11.000.000	100%
41	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor LainKeluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	55.101.000	55.101.000	100%

VIII.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi		28.894.700	28.894.700	100%
42	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	28.894.700	28.894.700	100%
IX	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		35.415.000	35.415.000	89%
IX.1	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		35.415.000	35.415.000	100%
43	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	35.415.000	35.415.000	100%
44	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0	0	0%

		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal			
45	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	0	0	0%
46	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai	0	0	0%
IX.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		0	0	0%
47	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0	0	0%

X	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		23.600.000	23.100.000	98%
X.1	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		0	0	0%
48	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kelompok Genre yang dibina	0	0	0%
49	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	0	0	0%
50	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	0	0	0%
51	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	0	0	0%
X.2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakat Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		23.600.000	23.100.000	98%

LAPORAN KINERJA DINAS P3AKB PROVSU TAHUN 2024

52	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	13.731.000	13.431.000	98%
53	Fasilitasi kegiatan pemberdayaanEkonomi Keluarga di tingkat provinsidan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi tentang pemberdayaan ekonomi keluarga dan pengelolaan keuangan keluarga	9.869.000	9.669.000	98%
			17.767.342.168	16.872.938.103	94,97%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024. Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera memiliki 6 sasaran strategis yang secara umum keseluruhannya tercapai.
2. Faktor keberhasilan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara adalah kuatnya koordinasi pelaksanaan intervensi program dan kegiatan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun capaian

tersebut masih perlu terus ditingkatkan dengan berbagai macam inovasi dan langkah konkret, melalui beberapa langkah :

1. Menyusun peta jalan pembangunan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Memetakan potensi intervensi di tiap lokasi sasaran prioritas untuk memberikan garansi ketepatan pelaksanaan kegiatan melalui pemanfaatan dan perluasan jejaring mitra hingga ke level terkecil dari kelompok masyarakat;
3. Perbaikan dari kualitas perencanaan dan anggaran yang berbasis pada hasil (outcome).
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Medan, Februari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA

DWI ENDAH PURWANTI, S.S, M.Si
NIP. 197301231998032002